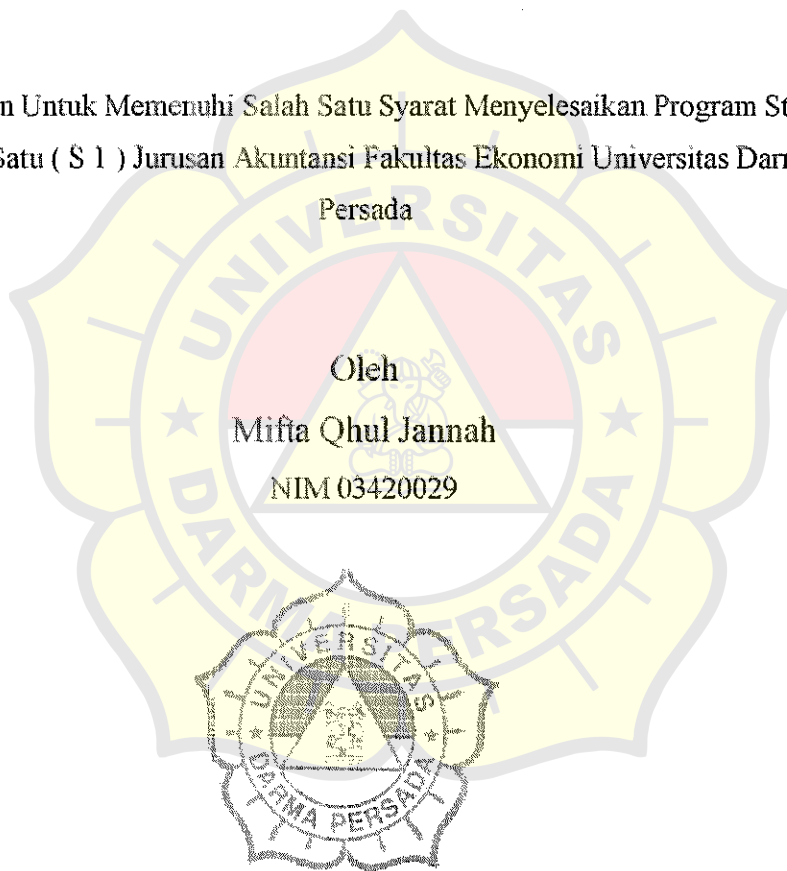


**KEEFEKTIFAN PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 25 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA  
KPP BEKASI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi  
Strata Satu ( S 1 ) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Darma  
Persada

Oleh  
Mifta Qhul Jannah  
NIM 03420029



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DARMA PERSADA  
JAKARTA  
2007**

**KEEFEKTIFAN PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 25 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA  
KPP BEKASI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi  
Strata Satu ( S 1 ) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Darma  
Persada

Oleh

Mifta Qhul Jannah

NIM 03420029



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DARMA PERSADA  
JAKARTA  
2007**



FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JURUSAN AKUNTANSI

**PERSETUJUAN**

**Skripsi yang berjudul :**

**“Keefektifan Pengawasan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib  
Pajak Orang Pribadi Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP  
Bekasi ”**

Oleh :

Nama : Mifta Qhul Jannah

NIM : 03420029

Telah disetujui untuk diajukan .

Jakarta, 31 Juli 2007

Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing Materi

(Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM)

(Muhammad Masdar, SE, Ak)



FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JURUSAN AKUNTANSI

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul :

**“Keefektifan Pengawasan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib  
Pajak Orang Pribadi Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP  
Bekasi ”**

Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia penguji skripsi pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Juli 2007


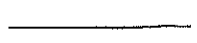
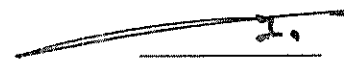
Waktu : 08.00 s.d selesai

Oleh :

Nama : Mifta Qhul Jannah

NIM : 03420029

### Panitia Penguji Skripsi

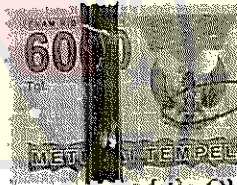
Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM	Ketua	
2. Drs. M. Iman Nugroho, Ak, MM	Anggota	
3. Muhammad Masdar, SE, Ak	Anggota	

## LEMBAR PERNYATAAN

Skripsi yang berjudul : “Keefektifan Pengawasan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Bekasi ”

Bersama ini penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya. Skripsi ini disusun dibawah bimbingan Muhammad Masdar, SE, Ak.

Jakarta, 31 Juli 2007



Mifta Qhul Jannah

## ABSTRAK

(A) Mifta Qhul Jannah : 03420029

(B) Keefektifan Pengawasan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Bekasi.

(C) ix + 76 Hal, 10 Lampiran

(D) **Kata Kunci** : Pengawasan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak

(E) **Alasan dan Tujuan Penelitian** : Untuk mengevaluasi sejauh mana keefektifan pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 wajib pajak orang pribadi yang dilakukan selama ini sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Bekasi, serta mengevaluasi pelaksanaan, sarana pengawasan, dan proses administrasi yang dilakukan terhadap pembayaran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak orang pribadi, dan mengevaluasi kendala atau hambatan serta upaya yang dilakukan KPP Bekasi dalam melakukan pengawasan.

**Hasil Penelitian** : Pengawasan terhadap pembayaran PPh Pasal 25 WP OP perlu ditingkatkan lagi atau belum efektif sepenuhnya, berdasarkan data hasil penelitian Jumlah penerimaan pajak pada KPP Bekasi mengalami penurunan sebesar 0,13% hal tersebut juga diikuti dengan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan.

**Kesimpulan dan Saran** : Pengawasan Pembayaran atas PPh Pasal 25 WP OP merupakan hal yang sangat penting karena dengan pengawasan yang baik akan berakibat meningkatnya penerimaan pajak pada KPP Bekasi.

(F) **Daftar Pustaka** : 12 ( 1992 – 2006 )

(G) **Pembimbing Materi** : Muhammad Masdar, SE, Ak.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang atas segala rahmat, berkat dan kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat – syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Darma Persada, Jakarta. Skripsi ini berjudul “Keefektifan Pengawasan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Bekasi”.

Mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai macam kekurangan dan tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, moril maupun materil, selama penulis menyelesaikan proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, serta dukungan moril dan materil selama penulis menuntut ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah Swt selalu melindungi dan memberikan kebahagiaan “*Amin*”.

2. Bapak Muhammad Masdar, SE, Ak, selaku pembimbing skripsi yang penuh kesabaran telah memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM selaku ketua jurusan akuntansi yang telah memberi masukan dan nasihat yang sangat berkesan bagi penulis.
4. Ibu Dra Sri Ari Wahyuningsih, MM, selaku sekretaris jurusan akuntansi yang telah membantu dalam proses administrasi selama penulis kuliah.
5. Dekan, Jajaran, seluruh dosen, dan civitas Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada.
6. Ibu Syamsidar, selaku Korlak PPh OP I KPP Bekasi yang telah memberikan bantuan di dalam pencarian data di dalam skripsi ini.
7. *Mbak* Maria yang dengan sabar memberikan bantuan dalam pencarian dokumen – dokumen yang dibutuhkan di dalam skripsi ini.
8. *Kakak* Moco di Bandung yang telah memperbaiki komputer yang sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan skripsi ini, serta telah memberikan semangat dan masukan yang sangat berarti bagi penulis.
9. *Kakak* Hamzah, *Mbak* Wuri, adikku Fa'i, "*The Little Star*" Fatih dan Yusuf yang telah memberikan semangat dan bantuan selama pembuatan skripsi ini.
10. UKM Swara Unsada, Himada, BEM FE kepengurusan tahun 2005 - 2006 yang telah memberikan banyak pengalaman, pengetahuan organisasi bagi penulis.
11. Sahabat – sahabatku di dalam maupun luar kampus yang tidak dapat saya sebutkan satu – satu khususnya Wida dan "*delapan srikandi*" (Hikmah,

Juleha. Dian, Ai, Devi, Fitria, Vena) yang selalu ceria dalam kebersamaan,  
terima kasih atas do'a kalian.

Akhir kata, seiring doa dan harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna  
dalam kehidupan penulis di masa depan serta bagi pihak lain yang membutuhkan.

Jakarta, 31 Juli 2007

( Mifta Qhul Jannah )



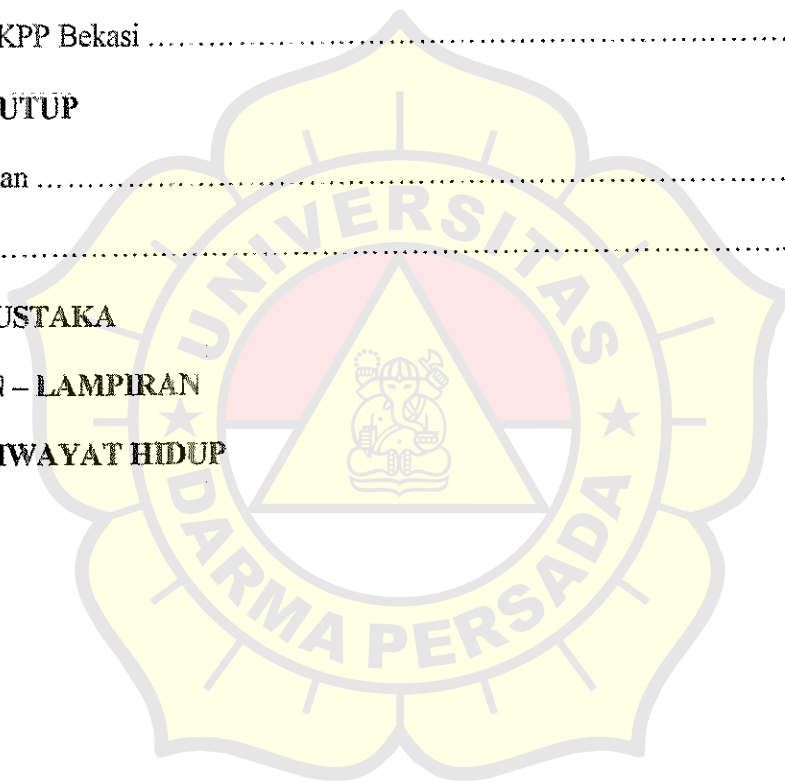
## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Pembatasan Masalah .....	4
1.4 Perumusan Masalah .....	5
1.5 Tujuan dan manfaat penelitian .....	5
1.5.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.5.2 Manfaat Penelitian .....	6
1.6 Metodologi Penelitian .....	6
1.6.1 Sumber Data .....	6
1.6.2 Metode dan Teknik yang digunakan .....	7

1.6.3 Metode Analisis Data .....	8
1.7 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Tinjauan Umum tentang Perpajakan .....	10
2.1.1 Pengertian Pajak .....	10
2.1.2 Fungsi Pajak .....	11
2.1.3 Asas – asas Pemungutan Pajak .....	12
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak Lainnya .....	14
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak .....	15
2.2 Tinjauan Umum tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi .....	16
2.2.1 Pengertian Subjek Pajak .....	16
2.2.2 Subjek PPh OP .....	16
2.2.2.1 Subjek Pajak Dalam Negeri .....	16
2.2.2.2 Subjek Pajak Luar Negeri .....	17
2.2.3 Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif .....	18
2.2.4 Pengecualian Subjek PPh OP .....	19
2.2.5 Objek Pajak Penghasilan .....	20
2.2.6 Pengecualian Objek Pajak .....	27
2.2.7 Tarif PPh OP .....	29
2.3 Tinjauan Umum tentang Pajak Penghasilan Pasal 25 .....	30
2.3.1 Cara Menghitung PPh Pasal 25 .....	30
2.3.2 Beberapa masalah atau kasus untuk menghitung besarnya PPh Ps. 25 .....	32

2.3.3 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25 .....	33
2.4 Tinjauan Umum tentang Pengawasan .....	33
2.4.1 Definisi Pengawasan .....	33
2.4.2 Fungsi Pengawasan .....	34
<b>BAB III OBJEK PENELITIAN</b>	
3.1 Sejarah KPP Bekasi .....	36
3.2 Struktur Organisasi KPP Bekasi .....	37
3.3 Kedudukan, tugas pokok, dan fungsi KPP Bekasi .....	48
3.4 Potensi pajak dan prospek pajak di KPP Bekasi .....	49
<b>BAB IV ANALISA DAN HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Data Hasil Penelitian .....	50
4.1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang efektif. ....	50
4.1.2 Rencana dan realisasi penerimaan pajak. ....	51
4.1.3 Jumlah tingkat kepatuhan penyampaian SPT masa dan SPT Tahunan WP OP .....	52
4.1.4 Peranan penerimaan STP PPh Pasal 25 WP OP terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 WP OP .....	55
4.2 Analisis Hasil Penelitian .....	56
4.2.1 Pengawasan dan Pembayaran PPh Pasal 25 .....	56
4.2.2 Sarana pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 WP OP. ....	57
4.2.3 Hasil dari Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran PPh Pasal 25 WP orang pribadi .....	59

4.2.4 Proses administrasi penerimaan pembayaran PPh Pasal 25	
WP OP .....	64
4.2.4 Kendala – kendala yang dihadapi KPP Bekasi dalam melakukan	
Pengawasan untuk meningkatkan Penerimaan PPh OP .....	67
4.2.5 Upaya – Upaya mengatasi kendala Pengawasan yang dilakukan	
KPP Bekasi .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	73
5.2 Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif .....	18
Tabel 2.2 Tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri .....	30
Tabel 4.1 Jumlah WP terdaftar dan WP efektif	
Tahun 2005 dan Tahun 2006 .....	50
Tabel 4.2 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2005 dan	
Tahun 2006 .....	51
Tabel 4.3 Tingkat kepatuhan penyampaian SPT masa PPh Pasal 25	
WP OP Tahun 2005 dan 2006 .....	52
Tabel 4.4 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh	
Ps. 25 WP OP Tahun 2005 dan Tahun 2006 .....	53
Tabel 4.5 Peranan Penerimaan STP PPh Ps 25 WP OP terhadap	
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 WP OP .....	55

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Bekasi .....	47



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Kegiatan Penyusunan Skripsi
2. Surat Keterangan Magang di KPP Bekasi
3. Peta Kota Bekasi
4. Rencana KPP Pratama Bekasi Utara
5. Lembar Pengawasan Arus Dokumen Angsuran Pembayaran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi.
6. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi.
7. Lembar Pengawasan Arus Dokumen Angsuran Pembayaran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Nihil.
8. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Nihil.
9. Formulir 1770 S (SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas).
10. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE – 06 / PJ.9 / 2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagaimana negara berkembang lainnya disamping menyelenggarakan pemerintahan umum juga melaksanakan pembangunan. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus – menerus dan berkesinambungan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, oleh karena itu untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional diperlukan sumber dana yang cukup besar yang berasal dari berbagai sumber penerimaan negara.

Sumber dana yang diperoleh untuk melaksanakan pembangunan di dapat dari berbagai sektor, diantaranya sektor migas dan non migas. Sumber penerimaan dari dalam negeri biasanya berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor, sedangkan sumber penerimaan negara dari luar negeri berupa bantuan dan pinjaman luar negeri. Sumber penerimaan negara yang paling rutin sampai saat ini adalah sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri terutama dari sektor non migas yaitu sektor pajak. Sektor pajak menjadi alternatif utama untuk mengisi kas negara guna melaksanakan dan melanjutkan pembangunan nasional. Untuk itu pemerintah lebih mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak, maka hal ini perlu didukung oleh kebijakan – kebijakan yang tepat di bidang perpajakan diantaranya memperbaharui undang – undang perpajakan tahun 2000 yaitu :

1. Undang – undang nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang – undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang – undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang – undang nomor 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Undang – undang nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan atas undang – undang nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
5. Undang – undang nomor 20 tahun 2000 tentang perubahan atas undang – undang nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dengan adanya pembaharuan peraturan perundang – undangan perpajakan ( *Tax Reform* ) terjadi perubahan sistem pemungutan pajak, dimana yang sebelumnya menganut sistem *official assessment* diubah menjadi sistem *self assessment*, yang berarti wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor sendiri pajaknya, dan melaporkan pemenuhan kewajiban pajaknya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan.

Pembayaran pajak penghasilan pasal 25 merupakan wujud pelaksanaan sistem *self assessment* karena dihitung, disetor dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, sedangkan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun

berjalan yang lain seperti pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 dilakukan melalui pemotongan atau pungutan oleh pihak lain, sehingga kemungkinan lolos dari kewajiban membayar adalah kecil. Oleh karena itu masalah pembayaran pajak penghasilan pasal 25 harus mendapat perhatian lebih serius oleh aparat perpajakan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh wajib pajak.

Pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 wajib pajak orang pribadi yang dilakukan oleh KPP Bekasi yaitu dengan melaksanakan urusan penatausahaan pembayaran masa dan tahunan, pemantauan, penelahaan, dan pencatatan penerimaan seluruh pajak penghasilan. Salah satu sarana pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 Wajib pajak Orang Pribadi yang digunakan yaitu melalui Surat Setoran Pajak ( SSP ) yang masuk, dimana apabila pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut efektif maka akan meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Bekasi, begitu pula sebaliknya apabila pengawasan pembayaran PPh pasal 25 wajib pajak orang pribadi tidak efektif maka penerimaan pajak pada KPP Bekasi akan menurun.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengawasan terhadap pembayaran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak orang pribadi bila dikaitkan dengan peningkatan penerimaan pajak pada KPP Bekasi dengan menuangkannya pada skripsi yang berjudul **“KEEFEKTIFAN PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP BEKASI”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian untuk membahas masalah – masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap pembayaran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak orang pribadi yang diterapkan selama ini oleh KPP Bekasi.
2. Bagaimana sarana pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 wajib pajak orang pribadi yang diterapkan oleh KPP Bekasi.
3. Bagaimana proses administrasi penerimaan pembayaran PPh Pasal 25 wajib pajak orang pribadi pada KPP Bekasi.
4. Bagaimana Upaya yang dilakukan KPP Bekasi terhadap kendala atau hambatan selama dilakukannya pengawasan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak orang pribadi.
5. Bagaimana keefektifan pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 wajib pajak orang pribadi yang dilakukan selama ini sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Bekasi.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan indentifikasi masalah tersebut diatas, dan berdasarkan keterbatasan yang datang dari penulis seperti data, akses, waktu, dan biaya yang tersedia sehingga penulis telah maksimal melakukan penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan pengawasan pembayaran atas Pajak Penghasilan Pasal 25

wajib pajak orang pribadi untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Bekasi.

#### **1.4 Perumusan Masalah**

1. Apakah pelaksanaan, sarana pengawasan, dan proses administrasi yang dilakukan terhadap pembayaran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak orang pribadi telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan Undang – undang Perpajakan.
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh KPP Bekasi terhadap kendala atau hambatan selama dilakukannya pengawasan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak orang pribadi, telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan Undang – undang Perpajakan.
3. Apakah pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 wajib pajak orang pribadi yang dilakukan telah efektif serta dapat meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Bekasi.

#### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian mengenai masalah yang dikemukakan diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan, sarana pengawasan, dan proses administrasi yang dilakukan terhadap pembayaran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak orang pribadi yang diterapkan oleh KPP Bekasi.

2. Untuk mengevaluasi kendala atau hambatan selama dilakukannya pengawasan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak orang pribadi pada KPP Bekasi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut.
3. Untuk mengevaluasi keefektifan pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 wajib pajak orang pribadi yang dilakukan selama ini sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Bekasi.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, bermanfaat dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan bermasyarakat atau di dalam praktek kerja langsung dilapangan.
2. Bagi KPP Bekasi, sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran khususnya tentang pengawasan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak orang pribadi.
3. Bagi masyarakat Akademis, sebagai bahan referensi atau perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Sumber data**

Data yang terdapat dalam skripsi ini diperoleh dari berbagai sumber :

#### **1. Data Primer**

Merupakan sumber data yang diperoleh dari KPP Bekasi. Data tersebut diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung baik secara lisan

maupun tulisan dengan pihak – pihak yang bersangkutan pada KPP Bekasi sehingga diketahui gambaran mengenai masalah yang akan dibahas secara objektif.

## 2. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai buku melalui riset kepustakaan, buku – buku ilmiah dan catatan kuliah yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

### 1.6.2 Metode dan Teknik yang digunakan

Dalam penyusunan skripsi ini Metode dan Teknik yang digunakan adalah :

#### 1. *Library Research*

Penelitian perpustakaan yang dilakukan yaitu dengan mendapatkan data teoritis, yang diperoleh dari buku – buku yang ada di perpustakaan dan mendalami tulisan - tulisan ilmiah lain yang terdapat dalam literature yang relevan dengan pokok - pokok pembahasan skripsi ini.

#### 2. *Field Research* ( Riset Lapangan )

Dalam melakukan penelitian ini diadakan wawancara dengan pejabat – pejabat yang berwenang, meneliti dokumen atau pun catatan perusahaan untuk dapat memperoleh fakta atau data – data, dengan kata lain penelitian ini dilaksanakan dengan mengadakan tinjauan langsung kepada objek yang diteliti untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dengan cara :

### **a. Wawancara**

Berupa menyusun daftar pertanyaan yang berhubungan dengan tema penelitian yang akan diteliti. Wawancara tersebut akan dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian dalam hal ini pihak KPP Bekasi.

### **b. Observasi atas Dokumen dan Catatan**

Berupa pengamatan langsung untuk memperoleh dokumen ataupun catatan yang berhubungan dengan FPh Pasal 25 Orang Pribadi yang berasal dari KPP Bekasi.

### **1.6.3 Metode Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analitis. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan objek penelitian yang sesungguhnya, melalui pengumpulan dan penyusunan data yang selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan melalui perbandingan dengan teori yang relevan.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari pembahasan masalah ini, skripsi ini terbagi dalam lima (5) bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, berikut sekilas secara garis besar tiap-tiap bab, dengan sajian sbb :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan latar belakang masalah penelitian, indentifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA / LANDASAN TEORI**

Pada Bab II ini, penulis menguraikan secara umum tentang perpajakan, pajak penghasilan orang pribadi, serta pajak penghasilan pasal 25.

## **BAB III OBJEK PENELITIAN**

Pada Bab III, Penulis menguraikan mengenai gambaran umum KPP Bekasi yang meliputi sejarah singkat perkembangan KPP Bekasi, struktur organisasi KPP Bekasi, kedudukan, tugas dan fungsi KPP Bekasi, dan wilayah kerja KPP Bekasi.

## **BAB IV ANALISA DAN HASIL PENELITIAN**

Pada Bab IV, Penulis membahas mengenai pengawasan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada KPP Bekasi. Kemudian dilanjutkan dengan membahas tentang kendala atau masalah yang dihadapi oleh KPP Bekasi dalam melakukan pengawasan, serta upaya – upaya mengatasi kendala dan masalah tersebut.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini terbagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama mengenai Kesimpulan yang memuat tentang kesimpulan atas pembahasan di dalam skripsi ini. Sub bab kedua mengenai saran-saran, dimana dalam sub bab ini disampaikan tentang saran Penulis terhadap apa yang menjadi judul Skripsi ini.